

**STRATEGI PENINGKATAN KINERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
KABUPATEN PACITAN
DALAM PENANGGULANGAN BENCANA**

Tesis

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S-2
Program Studi Magister Manajemen



Diajukan oleh
AGUNG MUKTI WIBOWO
161403335

Kepada
MAGISTER MANAJEMEN
STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA
2018

Abstrak

Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan dalam Upaya Penanggulangan Bencana banjir dan tanah longsor, untuk mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan dalam Upaya Penanggulangan Bencana banjir dan tanah longsor. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu menggunakan teori penelitian penjelasan dengan maksud untuk menafsirkan fenomena yang terjadi dalam kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan dalam Upaya Penanggulangan Bencana banjir dan tanah longsor dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai teknik pengumpulan data yang ada. Menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti wawancara dan observasi langsung.

Kata Kunci : Analisis Kinerja, BPBD Kabupaten Pacitan, Penanggulangan Bencana

STIE Widya Wiyana
Jangan Plagiat

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Tesis dengan judul **”Strategi Peningkatan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pacitan Dalam Penanggulangan Bencana”** dapat saya selesaikan dengan baik.

Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu serta mendukung saya dalam menyelesaikan Tesis ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Dra. Suci Utami Wikaningtyas, MM selaku Dosen Pembimbing II yang telah langsung membimbing saya dengan sabar dan memberi masukan dalam penyusunan tesis ini, hingga memberikan peran yang penting dalam pelaksanaan ujian pendadaran berlangsung.
2. Bapak Dr. Zaenal Mustofa, EQ, MM selaku Dosen Pembimbing I yang memberikan arahan dalam penyusunan tesis ini.
3. Bapak Tri Mudjiharto yang memberi dorongan moril kepada saya hingga bisa menyelesaikan tugas ini.
4. Kepala Pelaksana, karyawan dan relawan BPBD Kabupaten Pacitan yang telah membantu terselesaikannya tesis ini.
5. Bapak Masrukin sebagai koordinator angkatan 16.1.F, terima kasih arahnya.
6. Untuk kedua orang tuaku, Bapak dan Ibu yang selalu memberikan dorongan semangat dan do'a.

7. Untuk istri tercinta dan anak-anaku, atas semangat dan doanya.
8. Pak Lilik, mas Pras, mas Radit, bang Eko dan kak Mirdam, yang telah memberi semangat dalam kelompok bimbingan.
9. Kepada semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu, terima kasih telah bersedia membantu dan memberikan informasi dalam penyusunan tesis ini.

Saya menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, dikarenakan keterbatasan ilmu saya, oleh karena itu saya dengan rendah hati memohon maaf atas kekurangan dan kelemahan yang terdapat dalam tesis ini, saya berharap adanya kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penelitian ini.

Yogyakarta, April 2018

Agung Mukti Wibowo

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	10
1.3. Pertanyaan Penelitian	11
1.4. Tujuan Penelitian	11
1.5. Manfaat Penelitian	11
1.5.1. Manfaat Teoritis	11
1.5.2. Manfaat Praktis	11
BAB II LANDASAN TEORI	12
2.1. Pengertian Organisasi	12
2.2. Pengertian Kinerja Organisasi	13
2.3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi	16
2.4. Strategi Organisasi	18
2.5. Tingkatan Strategi	22
2.6. Proses Dan Tahapan Manajemen Strategi	23
2.7. Penanggulangan Bencana	25
2.8. Upaya Penanggulangan Bencana	27
2.9. Proses Penanggulangan Bencana	29
2.10. Pengertian Analisis SWOT	30
BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1. Lokasi Penelitian	31
3.2. Sasaran Penelitian	31
3.3. Teknik Pemilihan Informan	31

3.4.	Teknik Pengumpulan Data	32
1.4.1.	Wawancara Mendalam (<i>Indepth Interview</i>)	32
1.4.2.	Observasi	33
1.4.3.	Rekaman Arsip	34
3.5.	Sumber Data	35
1.5.1.	Data Primer	35
1.5.2.	Data Sekunder	35
3.6.	Analisis Data	36
1.6.1.	Reduksi Data	37
1.6.2.	Penyajian Data	37
1.6.3.	Penarikan Kesimpulan	37
3.7.	Validitas Data	38
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
4.1.	Deskripsi Lokasi Penelitian	41
4.1.1.	Letak Dan Keadaan Geografis	41
4.1.2.	Sejarah Kejadian Bencana Kabupaten Pacitan	42
4.1.3.	Pendidikan	45
4.1.4.	Kesehatan Dan Keluarga Berencana	45
4.1.5.	Pemerintahan	46
4.2.	Pembukaan Akses Terhadap Informan	47
4.3.	Hasil Penelitian	47
4.3.1.	Kualitas Hasil Kerja	47
4.3.2.	Ketepatan Waktu Menyelesaikan Pekerjaan	50
4.3.3.	Inisiatif	52
4.3.4.	Kemampuan Menyelesaikan Pekerjaan	54
4.3.5.	Kemampuan membina kerjasama dengan pihak lain	57
4.4.	Analisis Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan dalam Upaya Penanggulangan Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Pacitan	58
4.5.	Analisis Kendala yang dihadapi Badan Penanggulangan	

Bencana Daerah Kabupaten Pacitan dalam Upaya	
Penanggulangan Bencana Banjir dan Tanah Longsor	59
4.6.1. Kurang Adanya Koordinasi	59
4.6.2. Kurangnya Sarana dan Prasarana	60
4.6.3. Kurangnya Sumber Daya Manusia	60
4.6.4. Belum terlaksananya SOP (Standar Operasional	
Prosedur)	61
4.6. Analisis strategi yang dilakukan dalam menghadapi	
kendala yang ada pada BPBD Kabupaten Pacitan dalam	
Upaya Penanggulangan Bencana Banjir dan Tanah	
Longsor menggunakan matriks SWOT	61
4.6.1. Kualitas Hasil Kerja	61
4.6.2. Ketepatan Waktu Menyelesaikan Pekerjaan	63
4.6.3. Inisiatif	64
4.6.4. Kemampuan Menyelesaikan Pekerjaan	65
4.6.5. Kemampuan membina kerjasama dengan	
Pihak lain	66
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	68
2.1. Kesimpulan	68
2.2. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	viii

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Informasi Bencana Kabupaten Pacitan 43

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman	38
Gambar 2. Peta Kabupaten Pacitan	42
Gambar 3. Presentase Kejadian Bencana Kabupaten Pacitan	44

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Wilayah Indonesia merupakan gugusan kepulauan terbesar di dunia. Wilayah yang juga terletak di antara benua Asia dan Australia dan Lautan Hindia dan Pasifik ini memiliki 17.508 pulau. Meskipun tersimpan kekayaan alam dan keindahan pulau-pulau yang luar biasa, bangsa Indonesia perlu menyadari bahwa wilayah nusantara ini memiliki 129 gunung api aktif, atau dikenal dengan *ring of fire*, serta terletak berada pada pertemuan tiga lempeng tektonik aktif dunia ? Lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik.

Ring of fire dan berada di pertemuan tiga lempeng tektonik menempatkan negara kepulauan ini berpotensi terhadap ancaman bencana alam. Di sisi lain, posisi Indonesia yang berada di wilayah tropis serta kondisi hidrologis memicu terjadinya bencana alam lainnya, seperti angin puting beliung, hujan ekstrim, banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Tidak hanya bencana alam sebagai ancaman, tetapi juga bencana non alam sering melanda tanah air seperti kebakaran hutan dan lahan, konflik sosial, maupun kegagalan teknologi.

Indonesia adalah Negara yang rawan bencana. Hal ini terbukti dari berbagai hasil penilaian tentang risiko bencana, seperti Maplecroft (2010) menempatkan Indonesia sebagai Negara yang berisiko ekstrim peringkat 2 setelah Banglades, disamping juga masih ada indeks risiko yang dibuat oleh UN University dan UNDP. Kenyataan tersebut tidak dapat dipungkiri mengingat kondisi geografi dan

geologi Indonesia yang terletak pada pertemuan tiga lempeng raksasa Eurasia, Indoaustralia dan Pasifik, serta berada pada "Ring of Fire".

Penanggulangan bencana merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, yaitu serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. Seringkali bencana hanya ditanggapi secara parsial oleh pemerintah. Bahkan bencana hanya ditanggapi dengan pendekatan tanggap darurat (emergency response). Kurang adanya kebijakan pemerintah yang integral dan kurangnya koordinasi antar elemen dianggap sebagai beberapa penyebab yang memungkinkan hal itu dapat terjadi.

Pemerintah bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi fokus rekonstruksi dan rehabilitasi dari pasca bencana. Jaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan harus segera diupayakan, hal ini untuk mengantisipasi korban yang lebih banyak. Pemulihan kondisi dari dampak bencana dan pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam anggaran belanja negara yang memadai dan siap pakai dalam rekonstruksi dan rehabilitasi seharusnya menjadi jaminan bagi korban bencana.

Pola penanggulangan bencana mendapatkan dimensi baru dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (PerkaBNPB) Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 48 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja

BPBD yang diikuti beberapa aturan pelaksana terkait, yaitu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana.

Provinsi dan kabupaten/kota mulai mengembangkan kebijakan, strategi, dan operasi penanggulangan bencana sesuai dengan arah pengembangan kebijakan di tingkat nasional. Upaya penanggulangan bencana di daerah perlu dimulai dengan adanya kebijakan daerah yang bertujuan menanggulangi bencana sesuai dengan peraturan yang ada. Strategi yang ditetapkan daerah dalam menanggulangi bencana perlu disesuaikan dengan kondisi daerah. Operasi penanggulangan bencana secara nasional harus dipastikan berjalan efektif, efisien dan berkelanjutan. Untuk mendukung pengembangan sistem penanggulangan bencana yang mencakup kebijakan, strategi, dan operasi secara nasional mencakup pemerintah pusat dan daerah maka perlu dimulai dengan mengetahui sejauh mana penerapan peraturan terkait dengan penanggulangan bencana di daerah.

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dalam bagian dua tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah pasal 19 ayat 1 menyatakan “Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terdiri atas unsur: a) Pengarah penanggulangan bencana; b)

pelaksana penanggulangan bencana. Pada pasal 20 dijelaskan tentang fungsi dari BPBD yaitu: a) Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien; b) Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan bencana secara terpadu, terencana dan menyeluruh. Pasal 21 dijelaskan tentang tugas dari BPBD antara lain: a) Menetapkan pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan badan nasional penanggulangan bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan merata; b) Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan; c) Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana; d) Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana; e) Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya; f) Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana; g) Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang; h) Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah; serta i) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Secara geografis, wilayah Provinsi Jawa Timur dapat dikelompokkan dalam tiga zona : zona selatan, (plato), zona tengah (gunung berapi), dan zona utara (lipatan). Pada bagian tengah terbentang rangkaian pegunungan berapi (19 gunung, diantaranya Gunung Kelud, Gunung Bromo, Gunung Semeru). Pada

bagian selatan terdapat rangkaian perbukitan, yakni dari pesisir pantai selatan Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar hingga Malang. Pegunungan Kapur selatan merupakan kelanjutan dari rangkaian Pegunungan Sewu di Yogyakarta. Dua sungai terpenting di Jawa Timur adalah Sungai Brantas (290 km) dan Bengawan Solo.

Diwilayah seluas dengan kepadatan penduduk mencapai 772 jiwa per km persegi, banyak berkembang industri dan pertambangan (mineral, bahan galian dan migas). Dari 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, 30 diantaranya berada dalam kelas risiko tinggi. Ancaman bencana di Provinsi Jawa Timur yaitu : Banjir, Gempa Bumi, Tsunami, Kebakaran Permukiman, Kekeringan, Cuaca Ekstrem, Longsor, Gunung Api, Abrasi, Kebakaran Lahan dan Hutan, Gagal Teknologi, Epidemik dan Wabah Penyakit

Kabupaten Pacitan seperti halnya wilayah lain di Jawa Timur, secara geografis telah menempatkan kabupaten ini di dalam posisi yang rawan terhadap bencana. Berdasarkan IRBI (Indeks Risiko Bencana Indonesia) Tahun 2013 yang dikeluarkan oleh BNPB Tabel 2. Indeks Risiko Bencana Multi Ancaman per Kabupaten/Kota Tahun 2013, Kabupaten Pacitan menempati urutan ke 19 dari 496 Kabupaten/Kota seluruh Indonesia dengan skor 215 dan klasifikasi Risiko Tingkat TINGGI, dan pada Tabel 19. Indeks Risiko Bencana per Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Kabupaten Pacitan menempati urutan ke 5 dari 38 Kabupaten/Kota. Perubahan iklim global dan semakin parahnya degradasi lingkungan yang terjadi akan semakin meningkatkan kecenderungan bencana ini

di masa yang akan datang, bencana merupakan isu yang kompleks dan memerlukan suatu perencanaan yang matang dalam penanggulangannya.

Menghadapi ancaman bencana tersebut, Pemerintah Indonesia berperan penting dalam membangun sistem penanggulangan bencana di tanah air. Pembentukan lembaga merupakan salah satu bagian dari sistem yang telah berproses dari waktu ke waktu.

Dalam merespon sistem penanggulangan bencana saat itu, Pemerintah Indonesia sangat serius membangun legalisasi, lembaga, maupun budgeting. Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). BNPB memiliki fungsi pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur. Sedangkan di Kabupaten Pacitan dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan, salah satu tugasnya adalah menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara.

Pemerintah Kabupaten Pacitan memiliki Visi dan misi, yaitu :

Visi :

”MAJU DAN SEJAHTERA BERSAMA RAKYAT”

Misi:

1. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan akuntabel;
2. Meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sosial masyarakat;
3. Membangun perekonomian masyarakat dengan menggerakkan potensi daerah didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai;
4. Meningkatkan kesalehan sosial dan harmonisasi antar seluruh lapisan masyarakat.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan memiliki Visi dan Misi, yaitu :

Visi :

”TERWUJUDNYA PENANGGULANGAN BENCANA SECARA CEPAT, TEPAT, TERENCANA, TERKOORDINASI DAN TERPADU”

Misi:

1. Melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengendalian terhadap program, Administrasi , sumber daya manusia dan sarana prasarana aparatur.
2. Melaksanakan peningkatan kapasitas lembaga dan masyarakat dalam kesiapsiagaan serta pengurangan resiko bencana.
3. Melaksanakan sistem penanggulangan bencana yang efektif dan efisien secara terencana, terkoordinasi dan menyeluruh.
4. Melaksanakan peningkatan kapasitas perencanaan dalam pemulihan.

Pengelolaan informasi yang baik dibutuhkan dalam usaha penanganan bencana yang efektif dan efisien. Seperti untuk memprediksi adanya bencana, maka dibutuhkan data geografis sebuah daerah, atau ketika dideteksi akan terjadi bencana maka dibutuhkan sarana untuk dapat menyebarkan informasi kemasyarakat dalam waktu yang cepat. Demikian juga ketika menolong korban

bencana, dibutuhkan pertukaran informasi antara petugas di lapangan dengan pusat penanganan bencana antara lain untuk mengetahui keadaan di area bencana dan bantuan apa saja yang dibutuhkan. Informasi yang ada sedapat mungkin harus tersedia dengan cepat, tepat dan akurat serta dapat diakses dengan mudah bagi siapa saja yang membutuhkannya, karena itu dibutuhkan sistem informasi dalam penanggulangan bencana, karena pada dasarnya kesimpangsiuran informasi dapat menjadi salah satu penghambat keberhasilan dalam penanggulangan bencana, baik situasi pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana.

Belum lama ini tepatnya di bulan Nopember 2017 terjadi cuaca ekstrem akibat pengaruh Siklon Tropis Cempaka yang menyebabkan bencana banjir, longsor dan puting beliung. BMKG telah menyampaikan peringatan dini adanya siklon tropis Cempaka yang berada di perairan sekitar 32 km sebelah selatan-tenggara Pacitan Provinsi Jawa Timur. Kekuatan siklon 65 km per jam pada Selasa (28/11/2017). Dampak dari siklon tropis Cempaka adalah cuaca ekstrem seperti hujan deras, angin kencang, dan gelombang tinggi di Jawa dan Bali, Siklon Tropis Cempaka yang menyebabkan bencana terjadi di Jawa Timur. Hingga saat ini tercatat di Pusdalops BPBD Jatim, bencana akibat TC Cempaka adalah Pacitan, Sidoarjo, dan Ponorogo.

Penanganan bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Pacitan di hari pertama terkendala peralatan evakuasi berupa perahu yang sangat minim, disamping itu ketika air belum besar warga tidak mau dievakuasi ke tempat yang lebih aman, kendala komunikasi antara posko kantor dengan posko lapangan, koordinasi antar tim yang kurang lancar.

Di hari kedua penanganan bencana banjir dan tanah longsor ada masalah koordinasi yaitu perintah atasan dengan staf yang kurang komunikatif, tim evakuasi yang bekerja atas inisiatif sendiri karena dari atasan tidak segera memberi instruksi, padahal dilapangan harus segera ada penanganan, luasan daerah bencana yang merata diseluruh wilayah Kabupaten Pacitan, ada 12 kecamatan dan seluruhnya terdampak bencana, banyak komplain yang masuk ke posko BPBD dari masyarakat yang menyatakan kurang cepat responnya, minimnya informasi yang diperlukan masyarakat dan wartawan.

Disamping itu kantor BPBD juga menjadi korban banjir, hampir semua sarana dan prasarana kantor tenggelam, personil/karyawan yang semuanya kelelahan, jumlah pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan sedikit yang terdiri dari 10 orang, yaitu Kepala Pelaksana, Sekretaris Pelaksana, 3 orang Kepala Seksi dan 5 orang staf.

Permasalahan penanggulangan bencana banjir dan tanah longsor tampak semakin berat dan kompleks, sehingga membutuhkan perhatian khusus dan urgent dari semua pemangku kepentingan. Dalam penanggulangan bencana banjir dan tanah longsor tersebut, kinerja organisasi dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pacitan sebagai koordinator dan lembaga yang berwenang dan bertugas dibidang kebencanaan dituntut untuk bekerja secara optimal.

Kinerja organisasi merupakan salah satu sorotan yang paling tajam dalam pelaksanaan pemerintah menyangkut kesiapan, jumlah pendidikan dan profesionalisme. Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Kabupaten Pacitan sebagai salah satu organisasi pemerintah yang berwenang dalam penanggulangan bencana, memiliki peran dalam penyelenggaraan penanggulangan atas berbagai bencana di wilayah Kabupaten Pacitan, khususnya dalam penanggulangan bencana banjir dan tanah longsor. Pelaksanaan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Pacitan diperlukan kesiapan yang mantap demi terselenggaranya pelaksanaan pemerintah yang baik.

Atas dasar dari peristiwa-peristiwa bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di Daerah Kabupaten Pacitan, memunculkan berbagai pertanyaan mengenai kinerja BPBD Kabupaten Pacitan selaku instansi atau lembaga yang bergerak di sektor/bidang penanggulangan bencana.

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka saya bermaksud menyusun laporan penelitian dengan judul **"STRATEGI PENINGKATAN KINERJA BADAN NPENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN PACITAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA"**

1.2. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan informasi tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini diperlukan strategi peningkatan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan dalam penanggulangan bencana.

1.3. PERTANYAAN PENELITIAN

Bagaimana strategi meningkatkan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan dalam penanggulangan bencana

1.4. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk meningkatkan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan dalam upaya Penanggulangan Bencana.

1.5. MANFAAT PENELITIAN

1.5.1. MANFAAT TEORITIS

Memberikan kontribusi bagi pengembangan lembaga Badan Penanggulangan Bencana Daerah khususnya dalam penanggulangan bencana. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan rujukan serta tambahan alternatif untuk penelitian selanjutnya yang sejenis.

1.5.2. MANFAAT PRAKTIS

Dari penelitian ini diharapkan strategi kinerja tersebut dapat memberikan manfaat untuk peningkatan kinerja lembaga Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pacitan dalam Penanggulangan Bencana.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pengertian Organisasi

Organisasi merupakan suatu struktur pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang pemegang posisi yang bekerjasama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai tujuan tertentu. Menurut Pradjudi Armosudiro organisasi adalah struktur pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang pemegang posisi yang bekerjasama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai tujuan tertentu.

“organisasi ialah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang mana terdapat seseorang / beberapa orang yang disebut atasan dan seorang / sekelompok orang yang disebut dengan bawahan.”
(Armosudiro,2006:12)

Organisasi adalah sekelompok orang (dua atau lebih) yang secara formal dipersatukan dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Suatu organisasi di bentuk karena mempunyai dasar dan tujuan yang ingin dicapai, sebagaimana yang dikemukakan oleh James D Mooney:

Organisasi adalah bentuk perserikatan manusia untuk mencapai suatu tujuan bersama.akan tetapi perlu kita fahami bahwa yang menjadi dasar organisasi,bukan “siapa” akan tetapi “apanya” yang berarti bahwa yang dipentingkan bukan siapa orang yang akan memegang organisasi ,tetapi “apakah” tugas dari organisasi.
(Money,1996:23)

Sebuah organisasi dapat terbentuk karena dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti penyatuan visi dan misi serta tujuan yang sama dengan perwujudan

eksistensi sekelompok orang tersebut terhadap masyarakat. Organisasi yang dianggap baik adalah organisasi yang dapat diakui keberadaannya oleh masyarakat disekitarnya, karena memberikan kontribusi seperti pengambilan sumber daya manusia dalam masyarakat sebagai anggota-anggotanya sehingga menekan angka pengangguran.

2.2. Pengertian Kinerja Organisasi

Kinerja organisasi merupakan indikator tingkatan prestasi yang dapat dicapai dan mencerminkan keberhasilan suatu organisasi, serta merupakan hasil yang dicapai dari perilaku anggota organisasi.

Kinerja bisa juga dikatakan sebagai sebuah hasil (*output*) dari suatu proses tertentu yang dilakukan oleh seluruh komponen organisasi terhadap sumber-sumber tertentu yang digunakan (*input*). Selanjutnya, kinerja juga merupakan hasil dari serangkaian proses kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu organisasi. Bagi suatu organisasi, kinerja merupakan hasil dari kegiatan kerjasama diantara anggota atau komponen organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi.

“Kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi tercapainya tujuan organisasi berarti bahwa, kinerja suatu organisasi itu dapat dilihat dari tingkatan sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang didasarkan pada tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya”.
(Surjadi,2009:7)

Menurut Baban Sobandi Kinerja organisasi merupakan sesuatu yang telah dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu tertentu, baik yang terkait dengan *input, output, outcome, benefit, maupun impact*. (Sobandi, 2006:176).

Hasil kerja yang dicapai oleh suatu instansi dalam menjalankan tugasnya dalam kurun waktu tertentu, baik yang terkait dengan *input*, *output*, *outcome*, *benefit*, maupun *impact* dengan tanggung jawab dapat mempermudah arah penataan organisasi pemerintahan. Adanya hasil kerja yang dicapai oleh instansi dengan penuh tanggung jawab akan tercapai peningkatan kinerja yang efektif dan efisien. Organisasi pemerintahan menggunakan alat, teori yang digunakan yaitu teori kinerja dari Baban Sobandi dan para ahli lainnya dalam bukunya yang berjudul *Desentralisasi dan Tuntutan Penataan Kelembagaan Daerah*, berikut adalah indikator kinerja organisasi menurut baban sobandi :

1. Keluaran (*Output*)
2. Hasil
3. Kaitan Usaha dengan Pencapaian
4. Informasi Penjelas
(Sobandi ,2006 : 179-181)

Pertama, keluaran (*output*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang berupa fisik atau pun non fisik. Suatu kegiatan yang berupa fisik maupun non fisik yang diharapkan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Kelompok keluaran (*output*) meliputi dua hal. Pertama, kualitas pelayanan yang diberikan, indikator ini mengukur kuantitas fisik pelayanan. Kedua, kuantitas pelayanan yang diberikan yang memenuhi persyaratan kualitas tertentu. Indikator ini mengukur kuantitas fisik pelayanan yang memenuhi uji kualitas.

Kedua, hasil adalah mengukur pencapaian atau hasil yang terjadi karena pemberian layanan.segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Maka segala sesuatu kegiatan

yang dilakukan atau dilaksanakan pada jangka menengah harus dapat memberikan efek langsung dari kegiatan tersebut. Kelompok hasil, mengukur pencapaian atau hasil yang terjadi karena pemberian layanan, kelompok ini mencakup ukuran persepsi publik tentang hasil. Ukuran keluaran disebut sangat bermanfaat jika disajikan secara komparatif dengan hasil tahun sebelumnya, target, tujuan, atau sasaran, norma, atau standar yang diterima secara umum. Efek sekunder dari pelayanan atas penerimaan atau pengguna bisa teridentifikasi dan layak dilaporkan. Ukuran itu mencakup akibat tidak langsung yang signifikan, dimaksud atau tidak dimaksud, positif atau negatif, yang terjadi akibat pemberian pelayanan yang diberikan.

Ketiga, kaitan usaha dengan pencapaian adalah ukuran efisiensi yang mengkaitkan usaha dengan keluaran pelayanan. Berdasarkan pengertian diatas, maka Mengukur sumber daya yang digunakan atau biaya per unit keluaran, dan memberi informasi tentang keluaran di tingkat tertentu dari penggunaan sumber daya, menunjukkan efisiensi relatif suatu unit jika dibandingkan dengan hasil sebelumnya, tujuan yang ditetapkan secara internal, norma atau standar yang bisa diterima atau hasil yang bisa dihasilkan setara. Indikator yang mengaitkan usaha dengan pencapaian, meliputi dua hal. Pertama, ukuran efisiensi yang mengaitkan usaha dengan keluaran pelayanan, indikator ini mengukur sumber daya yang digunakan atau biaya per unit keluaran, dan memberi informasi tentang keluaran di tingkat tertentu dari penggunaan sumber daya di lingkungan organisasi. Kedua, ukuran biaya hasil yang menghubungkan usaha dan hasil pelayanan, ukuran ini melaporkan biaya per unit hasil, dan mengaitkan biaya

dengan hasil sehingga manajemen publik dan masyarakat bisa mengukur nilai pelayanan yang telah diberikan.

Keempat, informasi penjelas adalah suatu informasi yang harus disertakan dalam pelaporan kinerja yang mencakup informasi kuantitatif dan naratif. Membantu pengguna untuk memahami ukuran kinerja yang dilaporkan, menilai kinerja suatu organisasi, dan mengevaluasi signifikansi faktor yang akan mempengaruhi kinerja yang dilaporkan. Ada dua jenis informasi penjelas yaitu pertama, faktor substansial yang ada diluar kontrol seperti karakteristik lingkungan dan demografi. Kedua, faktor yang dapat dikontrol seperti pengadaan staf.

2.3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi

Kinerja dalam lingkup organisasi adalah hasil kerja yang telah dicapai oleh suatu organisasi dalam melakukan suatu pekerjaan dapat dievaluasi tingkat kinerjanya. Berhasil tidaknya tujuan dan cita-cita dalam organisasi tergantung bagaimana proses kinerja itu dilaksanakan. Kinerja organisasi tidak lepas dari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi:

1. Teknologi yang meliputi peralatan kerja dan metode kerja yang digunakan untuk menghasilkan produk atau jasa yang dihasilkan oleh organisasi. Semakin berkualitas teknologi yang digunakan, maka akan semakin tinggi tingkat kinerja organisasi tersebut.
2. Kualitas input atau material yang digunakan oleh organisasi.
3. Kualitas lingkungan fisik yang meliputi keselamatan kerja, penataan ruangan, dan kebersihan.
5. Budaya organisasi sebagai pola tingkah laku dan pola kerja yang ada dalam organisasi yang bersangkutan.

6. Kepemimpinan sebagai upaya untuk mengendalikan anggota organisasi agar bekerja sesuai dengan standar dan tujuan organisasi.
7. Pengelolaan sumber daya manusia yang meliputi aspek kompensasi, imbalan, promosi dan lainnya.
(Ruky, 2001:7)

Diatas menjelaskan mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi dalam pencapaian pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau instansi pemerintahan. Meningkatkan kinerja dalam sebuah organisasi atau instansi pemerintah merupakan tujuan atau target yang ingin dicapai oleh organisasi dan instansi pemerintah dalam memaksimalkan suatu kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berhasil tidaknya tujuan dan cita-cita dalam organisasi pemerinthan tergantung bagaimana proses kinerja itu dilaksanakan. kinerja tidak lepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi sebagaimana yang dikemukakan oleh Keith Davis dalam buku Anwar Prabu Mangkunegara.

1. Faktor Kemampuan *Ability* Secara psikologis, kemampuan ability terdiri dari kemampuan potensi *IQ* dan kemampuan *reality knowledge+skill*. Artinya pimpinan dan karyawan yang memiliki *IQ superior, very superior, gifted dan genius* dengan pendidikan yang memadai untuk jabatan dan terampil dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari maka akan mudah menjalankan kinerja maksimal.
2. Faktor motivasi *Motivation* Motivasi diartikan sebagai suatu sikap *attitude* pimpinan dan karyawan terhadap situasi kerja *situation* dilingkungan organisasinya. Mereka yang bersikap positif *pro* terhadap situasi kerjanya akan menunjukkan motivasi kerja tinggi dan sebaliknya jika mereka berpikir negatif kontra terhadap situasi kerjanya akan menunjukkan pada motivasi kerja yang rendah. Situasi yang dimaksud meliputi hubungan kerja, fasilitas kerja, iklim kerja, kebijakan pimpinan, pola kepemimpinan kerja dan kondisi kerja.
(Mangkunegara, 2006:13)

Berdasarkan pengertian diatas bahwa suatu kinerja organisasi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung dan penghambat berjalannya suatu pencapaian kinerja yang maksimal faktor tersebut meliputi faktor yang berasal dari intern maupun ekstern.

2.4. Strategi Organisasi

Pada awalnya strategi merupakan sebuah kata yang digunakan pada militer ketika sedang berperang, akan tetapi dengan berkembangnya jaman, maka istilah strategi ini sudah masuk ke dalam setiap aspek kehidupan, baik itu ekonomi, pendidikan maupun olahraga.

Definisi strategi adalah cara untuk mencapai tujuan jangka panjang. Strategi bisnis bisa berupa perluasan geografis, diversifikasi, akuisisi, pengembangan produk, penetrasi pasar, rasionalisasi karyawan, divestasi, likuidasi dan joint venture (David, p.15, 2004). Pengertian strategi adalah Rencana yang disatukan, luas dan berintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategis perusahaan dengan tantangan lingkungan, yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dari perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi (Glueck dan Jauch, p.9, 1989).

Pengertian strategi secara umum dan khusus sebagai berikut : Pengertian Umum Strategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Sedangkan Pengertian khusus Strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental (senantiasa

meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Dengan demikian, strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi. Griffin R.W., (2004:226) mengemukakan strategi ialah rencana komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi. Strategi fungsional menekankan terutama pada pemaksimalan sumber daya produktivitas, misalnya strategi pemasaran, strategi keuangan, strategi sumber daya manusia, strategi operasi, dan strategi penelitian dan pengembangan.

Menurut Carl Von Clausewits (Carl Philipp Gottfried) (1780-1831) seorang ahli strategi dan peperangan, Pengertian strategi adalah penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan "the use of engagements for the object of war". Kemudian dia menambahkan bahwa politik atau policy merupakan hal yang terjadi setelah terjadinya perang (War is a mere continuation of politics by other means/ Der Krieg ist eine bloße Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln).

Menurut bussines dictionary, pengertian strategi adalah metode atau rencana yang dipilih untuk membawa masa depan yang diinginkan, seperti pencapaian tujuan atau solusi untuk masalah; pengertian strategi adalah seni dan ilmu perencanaan dan memanfaatkan sumber daya untuk penggunaan yang paling efisien dan efektif. Istilah srategi berasal dari kata Yunani untuk ahli militer atau memimpin pasukan.

Menurut Henry Mintzberg (1998), seorang ahli bisnis dan manajemen, bahwa pengertian strategi terbagi atas 5 definisi yaitu strategi sebagai rencana,

strategi sebagai pola, strategi sebagai posisi (positions), strategi sebagai taktik (ploy) dan terakhir strategi sebagai perpesktif.

Pengertian strategi sebagai rencana adalah sebuah program atau langkah terencana (a directed course of action) untuk mencapai serangkaian tujuan atau cita cita yang telah ditentukan; sama halnya dengan konsep strategi perencanaan. Pengertian strategi sebagai pola (pattern) adalah sebuah pola perilaku masa lalu yang konsisten, dengan menggunakan strategi yang merupakan kesadaran daripada menggunakan yang terencana ataupun diniatkan. Hal yang merupakan pola berbeda dengan berniat atau bermaksud maka strategi sebagai pola lebih mengacu pada sesuatu yang muncul begitu saja (emergent).

Definisi strategi sebagai posisi adalah menentukan merek, produk ataupun perusahaan dalam pasar, berdasarkan kerangka konseptual para konsumen ataupun para penentu kebijakan; sebuah strategi utamanya ditentukan oleh faktor faktor eksternal.

Pengertian strategi sebagai taktik, merupakan sebuah manuver spesifik untuk mengelabui atau mengecoh lawan (competitor).

Pengertian strategi sebagai perspektif adalah mengeksekusi strategi berdasarkan teori yang ada ataupun menggunakan insting alami dari isi kepala atau cara berpikir ataupun ideologis.

2.5. Tingkatan Strategi

Tingkatan Strategi Dengan merujuk pada pandangan Dan Schendel dan Charles Hofer, Higgins (1985) menjelaskanadanya empat tingkatan strategi.

Keseluruhannya disebut Master Strategy, yaitu : enterprise strategy, corporate strategy, business strategy dan functional strategy.

1. Enterprise Strategy

Strategi ini berkaitan dengan respons masyarakat. Setiap organisasi mempunyai hubungan dengan masyarakat. Masyarakat adalah kelompok yang berada di luar organisasi yang tidak dapat dikontrol. Di dalam masyarakat yang tidak terkendali itu, ada pemerintah dan berbagai kelompok lain seperti kelompok penekan, kelompok politik dan kelompok sosial lainnya. Jadi dalam strategi enterprise terlihat relasi antara organisasi dan masyarakat luar, sejauh interaksi itu akan dilakukan sehingga dapat menguntungkan organisasi. Strategi itu juga menampakkan bahwa organisasi sungguh- sungguh bekerja dan berusaha untuk memberi pelayanan yang baik terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

2. Corporate Strategy

Strategi ini berkaitan dengan misi organisasi, sehingga sering disebut Grand Strategy yang meliputi bidang yang digeluti oleh suatu organisasi. Pertanyaan apa yang menjadi bisnis atau urusan kita dan bagaimana kita mengendalikan bisnis itu, tidak semata-mata untuk dijawab oleh organisasi bisnis, tetapi juga oleh setiap organisasi pemerintahan dan organisasi nonprofit. Apakah misi universitas yang utama ? Apakah misi yayasan ini, yayasan itu, apakah misi lembaga ini, lembaga itu ? Apakah misi utama direktorat jenderal ini, direktorat jenderal itu ? Apakah misi badan ini, badan itu ? Begitu seterusnya.

Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan itu sangat penting dan kalau keliru dijawab bisa fatal. Misalnya, kalau jawaban terhadap misi universitas ialah terjun kedalam dunia bisnis agar menjadi kaya maka akibatnya bisa menjadi buruk, baik terhadap anak didiknya, terhadap pemerintah, maupun terhadap bangsa dan negaranya. Bagaimana misi itu dijalankan juga penting. Ini memerlukan keputusan-keputusan stratejik dan perencanaan stratejik yang selayaknya juga disiapkan oleh setiap organisasi.

3. Business Strategy

Strategi pada tingkat ini menjabarkan bagaimana merebut pasaran di tengah masyarakat. Bagaimana menempatkan organisasi di hati para penguasa, para pengusaha, para donor dan sebagainya. Semua itu dimaksudkan untuk dapat memperoleh keuntungan-keuntungan stratejik yang sekaligus mampu menunjang berkembangnya organisasi ke tingkat yang lebih baik.

4. Functional Strategy

Strategi ini merupakan strategi pendukung dan untuk menunjang suksesnya strategi lain. Ada tiga jenis strategi functional yaitu:

- a. Strategi functional ekonomi yaitu mencakup fungsi-fungsi yang memungkinkan organisasi hidup sebagai satu kesatuan ekonomi yang sehat, antara lain yang berkaitan dengan keuangan, pemasaran, sumber daya, penelitian dan pengembangan.
- b. Strategi functional manajemen, mencakup fungsi-fungsi manajemen yaitu planning, organizing, implementating, controlling, staffing,

leading, motivating, communicating, decisionmaking, representing, dan integrating.

- c. Strategi isu stratejik, fungsi utamanya ialah mengontrol lingkungan, baik situasi lingkungan yang sudah diketahui maupun situasi yang belum diketahui atau yang selalu berubah (J. Salusu, p 101, 1996).

Tingkat-tingkat strategi itu merupakan kesatuan yang bulat dan menjadi isyarat bagi setiap pengambil keputusan tertinggi bahwa mengelola organisasi tidak boleh dilihat dari sudut kerapian administratif semata, tetapi juga hendaknya memperhitungkan soal “kesehatan” organisasi dari sudut ekonomi (J. Salusu, p 104, 1996).

2.6. Proses Dan Tahapan Manajemen Strategi

David (2011:6) menjelaskan bahwa proses manajemen strategis terdiri dari tiga tahapan, yaitu :

1. Perumusan Strategi (Strategy Formulation)

Perumusan strategi adalah tahap awal pada manajemen strategi, yang mencakup mengembangkan visi dan misi, mengidentifikasi peluang eksternal organisasi dan ancaman, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, menetapkan tujuan jangka panjang, menghasilkan strategi alternatif, dan memilih strategi tertentu untuk mencapai tujuan.

2. Implementasi Strategi (Strategy Implemented)

Implementasi strategi adalah tahap selanjutnya sesudah perumusan strategi yang ditetapkan. Penerapan strategi ini memerlukan suatu

keputusan dari pihak yang berwenang dalam mengambil keputusan untuk menetapkan tujuan tahunan, menyusun kebijakan, memotivasi karyawan, dan mengalokasikan sumber daya sehingga strategi yang dirumuskan dapat dilaksanakan. Pada tahap ini dilakukan pengembangan strategi pendukung budaya, merencanakan struktur organisasi yang efektif, mengatur ulang usaha pemasaran yang dilakukan, mempersiapkan budget, mengembangkan dan utilisasi sistem informasi serta menghubungkan kompensasi karyawan terhadap kinerja organisasi.

3. Evaluasi Strategi (Strategy Evaluation)

Evaluasi strategi adalah tahap akhir dalam manajemen strategis. Manajer sangat membutuhkan untuk tahu kapan strategi tertentu tidak bekerja dengan baik; Evaluasi strategi adalah alat utama untuk memperoleh informasi ini. Hal tersebut dapat dilakukan dengan penilaian atau melakukan proses evaluasi strategi. Dalam penilaian strategi terdapat tiga aktivitas penilaian yang mendasar, yaitu: Peninjauan ulang faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi landasan bagi strategi saat ini, Pengukuran kinerja, dan 3). Pengambilan langkah korektif. Penilaian strategi sangat diperlukan oleh suatu perusahaan karena strategi yang berhasil untuk saat ini tidak selalu berhasil untuk di masa yang akan datang

Kinerja merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha, dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerjanya. Hasil kombinasi tersebut terlihat dalam bentuk catatan outcome dalam periode waktu tertentu. Sedangkan menurut Henry

Simamor, Kinerja adalah tingkatan dimana para karyawan mencapai persyaratan-persyaratan pekerjaan dan memberikan hasil maksimal dari standar yang telah ditentukan selama masa periode waktu tertentu. Selain itu, menurut Rivai dan Basri Kinerja adalah kesediaan seseorang atau kelompok orang untuk melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawab dengan hasil seperti yang diharapkan.

Dari uraian dan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dihasilkan oleh kemampuan dari individu atau kelompok yang dilakukan berdasarkan kecakapan, pengalaman sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

2.7. Penanggulangan Bencana

Penanggulangan bencana seperti yang didefinisikan Agus Rahmat, merupakan seluruh kegiatan yang meliputi aspek perencanaan dan penanggulangan bencana, pada sebelum, saat dan sesudah terjadi bencana yang dikenal sebagai siklus manajemen bencana. Menurutnya, tujuan kegiatan ini adalah untuk mencegah kehilangan jiwa, mengurangi penderitaan manusia, memberi informasi masyarakat dan pihak berwenang mengenai risiko, dan mengurangi kerusakan infrastruktur utama, harta benda dan kehilangan sumber ekonomis.

Adapun Carter, mendefinisikan pengelolaan bencana sebagai suatu ilmu pengetahuan terapan (aplikatif) yang mencari, dengan observasi sistematis dan analisis bencana untuk meningkatkan tindakan-tindakan (measures) terkait dengan pencegahan (preventif), pengurangan (mitigasi), persiapan, respon darurat

dan pemulihan. Menurutnya, tujuan dari penanggulangan bencana diantaranya, yaitu mengurangi atau menghindari kerugian secara fisik, ekonomi maupun jiwa yang dialami oleh perorangan, masyarakat negara, mengurangi penderitaan korban bencana, mempercepat pemulihan, dan memberikan perlindungan kepada pengungsi atau masyarakat yang kehilangan tempat ketika kehidupannya terancam.

Undang-undang No.24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dalam Pasal 1 ayat (6) menyebutkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Dalam Pasal 3 ayat (1) dijelaskan bahwa asas-asas penanggulangan bencana, yaitu kemanusiaan, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, keseimbangan, keselarasan, dan keserasian, ketertiban dan kepastian hukum, kebersamaan, kelestarian lingkungan hidup, dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di ayat (2) digambarkan prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana, yaitu cepat dan tepat, prioritas, koordinasi dan keterpaduan, berdaya guna dan berhasil guna, transparansi dan akuntabilitas, kemitraan, pemberdayaan, nondiskriminatif dan nonproletisi. Adapun yang menjadi tujuan dari penanggulangan bencana (Undang-undang No.24 tahun 2007 Pasal 4), yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat dan ancaman bencana, menelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh, menghargai budaya lokal, membangun partisipasi

dan kemitraan publik serta swasta, mendorong semangat gotong-royong, dan kesetiakawanan, dan kedermawanan dan menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam penanggulangan bencana diatas, dapat dilihat bahwa yang merupakan salah satu prinsip dan tujuan penanggulangan bencana adalah koordinasi sehingga dapat disimpulkan koordinasi sangat berhubungan erat dengan penanggulangan bencana melalui tahapan-tahapan yang dilakukan pada sebelum, saat dan sesudah bencana terjadi.

2.8. Upaya Penanggulangan Bencana

Ada beberapa upaya dalam menanggulangi bencana seperti yang tertulis dalam Undang-undang No.24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yaitu:

1. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.(Pasal 1 ayat (6))
2. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.(Pasal 1 ayat (7))
3. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin pada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.(Pasal 1 ayat (8))

4. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. (Pasal 1 ayat (9))
5. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. (Pasal1 ayat (10))
6. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik dan masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. (Pasal 1 ayat (11))
7. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintah maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan prekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana. (Pasal1 ayat (12))

Dari pengertian-pengertian diatas mengenai beberapa upaya penanggulangan bencana, maka dapat disimpulkan bahwa ada banyak kegiatan

penanggulangan bencana yang dilakukan untuk mengatasi dan mencegah resiko bencana terjadi yang bertujuan untuk mengembalikan sumber-sumber daya diwilayah yang terkena bencana tersebut.

2.9. Proses Penanggulangan Bencana

Penanggulangan bencana dapat dibagi atas tiga tingkatan, yaitu pada tingkat lokasi disebut manajemen insiden, tingkat unit atau daerah disebut manajemen darurat, dan tingkat nasional atau korporat disebut manajemen krisis.

1. Manajemen insiden adalah penanggulangan kejadian di lokasi atau langsung di tempat kejadian. Dilakukan oleh tim tanggap darurat yang dibentuk atau petugas lapangan sesuai dengan keahliannya masing-masing. Penanggulangan bencana pada tingkat ini bersifat teknis
2. Manajemen darurat adalah upaya penanggulangan bencana di tingkat yang lebih tinggi yang mengkoordinir lokasi kejadian.
3. Manajemen krisis berada di tingkat yang lebih tinggi misalnya di tingkat nasional atau tingkat korporat bagi suatu perusahaan yang mengalami bencana.

Perbedaan tugas dan tanggung jawab pada ketiga tingkatan adalah berdasarkan fungsinya yaitu taktis dan strategis. Tingkat manajemen insiden, tugas dan tanggung jawab lebih banyak bersifat taktis dan semakin keatas tugasnya akan lebih banyak menangani hal yang strategis. Pengaturan fungsi dan peran sangat penting dilakukan dalam mengembangkan suatu penanggulangan bencana. Hambatan di lapangan pada dasarnya terjadi karena pengaturan tugas dan

peran tidak jelas. Siapa yang bertanggung jawab mengkoordinir bantuan dari pihak luar dan siapa yang mengelola bantuan tersebut setelah berada di lapangan. Siapa penentu kebijakan penanggulangan bencana dan siapa yang melakukan penerapannya di lapangan.

2.10. Pengertian Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah sebuah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi Strengths, Weakness, Opportunities, dan Threats dalam suatu proyek atau bisnis usaha. Hal ini melibatkan penentuan tujuan usaha bisnis atau proyek dan mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang baik dan menguntungkan untuk mencapai tujuan itu. Teknik ini dibuat oleh Albert Humphrey, yang memimpin proyek riset pada Universitas Stanford pada dasawarsa 1960-an dan 1970-an dengan menggunakan data dari perusahaan-perusahaan Fortune 500 (Grewal & Levy, 2008).

Teori Analisis SWOT adalah sebuah teori yang digunakan untuk merencanakan sesuatu hal yang dilakukan dengan SWOT. SWOT adalah sebuah singkatan dari, S adalah Strength atau kekuatan, W adalah Weakness atau kelemahan, O adalah Opportunity atau kesempatan, dan T adalah Threat atau ancaman. SWOT ini biasa digunakan untuk menganalisis suatu kondisi dimana akan dibuat sebuah rencana untuk melakukan suatu program kerja (Buchari Alma, 2008).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Penelitian dengan judul “Strategi Peningkatan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pacitan dalam Penanggulangan Bencana” mengambil lokasi di Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pacitan.

3.2. Sasaran Penelitian

Sasaran penelitian ini adalah Karyawan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pacitan dan masyarakat.

3.3. Teknik Pemilihan Informan

Teknik pemilihan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan saya menjelajahi objek dan situasi sosial yang diteliti (Sugiyono 2008: 50). Dengan demikian pemilihan informan tidak berdasarkan kuantitas, tetapi kualitas dari informan terhadap masalah yang akan diteliti.

Dalam pelaksanaan di lapangan guna pengumpulan data, pemilihan informan dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kemandirian saya didalam memperoleh data. Jadi yang menjadi kepedulian bagi saya kualitatif adalah tuntasnya perolehan informasi dengan keragaman variasi yang ada, bukan banyaknya sampel sumber data (Sugiyono 2008:57).

3.4. Teknik Pengumpulan Data

3.4.1. Wawancara Mendalam (*Indepth Interview*)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila saya ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila saya ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon (Sugiyono 2010: 137-138). Teknik ini dimaksudkan agar saya mampu mengeksplorasi data dari informan yang bersifat nilai, makna, dan pemahaman yang tidak mungkin dilakukan dengan teknik survei.

Wawancara bisa mengambil beberapa bentuk, yang paling umum, wawancara studi kasus bertipe *open-ended*, dimana saya dapat bertanya kepada informan kunci tentang fakta-fakta suatu peristiwa disamping opini mereka mengenai suatu peristiwa. Pada beberapa situasi saya bahkan bisa meminta

informan untuk mengetengahkan pendapatnya sendiri terhadap peristiwa tertentu dan bisa menggunakan proposisi tersebut sebagai dasar penelitian selanjutnya. Tipe wawancara yang kedua adalah wawancara yang terfokus, dimana informan diwawancarai dalam waktu yang pendek. Dalam kasus ini, wawancara tersebut bisa tetap *open-ended* dan mengasumsikan cara percakapan namun pewawancara tidak perlu mengikuti serangkaian pertanyaan tertentu yang diturunkan dari protokol studi kasusnya. Tipe wawancara yang ketiga memerlukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih terstruktur, sejalan dengan survai (Yin, 2002: 108-110).

3.4.2. Observasi

Sutrisno Hadi (1986) dalam Sugiyono (2010: 145) mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamatai terlalu besar. Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi *participant observation* (observasi berperan serta) dan *non participant observation*, selanjutnya dari segi instrumentasi yang digunakan

dapat dibedakan menjadi observasi terstruktur dan tidak terstruktur (Sugiyono2010: 145). Dalam proses pelaksanaan pengumpulan data, saya menggunakan metode non participant observation, kemudian untuk memudahkan pengumpulan data maka saya memilih instrumen observasi secara terstruktur agar mempermudah dalam penyusunan sub-sub penelitian guna menunjang laporan hasil penelitian.

3.4.3. Rekaman Arsip

Rekaman arsip seringkali dalam bentuk komputerisasi seperti peta dan bagan karakteristik geografis suatu tempat, daftar nama dan komoditi lain yang relevan, data survai, data rekaman atau data sensus yang terkumpul, rekaman keorganisasin seperti bagan dan anggaran organisasi periode tertentu. Rekaman-rekaman arsip ini dapat digunakan bersama-sama dengan sumber informasi lain dalam pelaksanaan studi kasus. Namun demikian, tidak seperti bukti dokumenter, kegunaan rekaman arsip akan bervariasi pada satu studi kasus lainnya. Pada beberapa penelitian, rekaman tersebut begitu penting sehingga bisa mejadi obyek perolehan kembali dan data analisis yang luas. Pada penelitian-penelitian lainnya rekaman arsip mungkin hanya sepintas relevansinya. Bilamana bukti arsip relevan, saya harus berhati-hati untuk menentukan kondisi yang menghasilkan bukti yang bersangkutan beserta keakuratannya (Yin, 2002: 106-107). Teknik pengumpulan data dengan rekaman arsip ini akan dilakukan oleh saya karena pada dasarnya rekaman arsip merupakan sumber data yang memiliki peran sebagai sumber informasi yang sangat berharga bagi pemahaman suatu peristiwa.

Rekaman arsip yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional Nomor 3 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2010, Pacitan Dalam Angka Tahun 2016 (Data BPS Kabupaten Pacitan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan, Proyeksi Peta Rawan Bencana Kabupaten Pacitan, hasil wawancara dengan informan dan bukti dokumentasi pada saat penelitian.

3.5. Sumber Data

3.5.1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan dan merupakan sumber data yang memiliki keterkaitan langsung dengan masalah yang dibahas. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan intensif. Untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti, maka saya menggunakan purposive sampling.

3.5.2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari buku-buku, dokumentasi, arsip, media massa, serta berbagai sumber lainnya yang mendukung penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional Nomor 3 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2010, Pacitan Dalam Angka Tahun 2016 (Data BPS

Kabupaten Pacitan), Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan, Proyeksi Peta Rawan Bencana Kabupaten Pacitan, hasil wawancara dengan informan dan bukti dokumentasi pada saat penelitian.

3.6. Analisis Data

Dalam hal analisis data kualitatif, Bogdan menyatakan bahwa “*Data analysis is the process of systematically searching and arranging the interview transcripts, fieldnotes, and other materials that you accumulate to increase your own understanding of them and to enable you to present what you have discovered to others*” Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain (Sugiyono 2008: 88).

Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Miles and Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data yaitu data reduction (reduksi data), data display (penyajian data) dan conclusion drawing/verification (penarikan kesimpulan).

3.6.1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah saya untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Sehingga reduksi data memerlukan proses berfikir sensitif dan kecerdasan, keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi (Sugiyono 2010: 247-249).

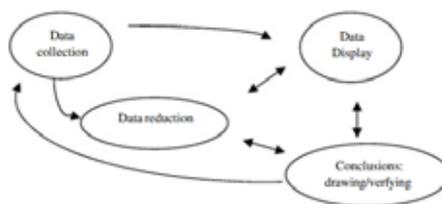
3.6.2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya serta penyajian data dalam penelitian adalah dengan sistematis melalui gambaran atau skema. Penyajian data dapat diartikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3.6.3. Penarikan Kesimpulan

Proses mengartikan atau penarikan segala hal yang ditemui selama penelitian yang dilakukan secara terus menerus. Kesimpulan yang dihasilkan harus dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung. Berikut gambaran model analisis interaktif Miles dan Huberman.

Gambar 1. Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman



Sumber: Diadaptasi dari Miles dan Huberman (1992: 20)

3.7. Validitas Data

Validitas data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi. Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh saya. Dengan demikian data yang valid adalah “data yang tidak berbeda” antara data yang dilaporkan oleh saya dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian. Validitas data dibagi menjadi dua yaitu validitas internal dan eksternal. Validitas internal berkenaan dengan derajat akurasi desain penelitian dengan hasil yang dicapai, sedangkan validitas eksternal berkenaan dengan derajat akurasi apakah hasil penelitian dapat digeneralisasi atau diterapkan pada populasi di mana sampel tersebut di ambil (Sugiyono 2010: 267). Untuk penelitian ini akan menggunakan validitas data internal karena lebih menekankan pada akurasi desain penelitian dengan hasil yang akan dicapai bukan menggeneralisasikan pada sebuah sampel. Validitas data ini akan mengeksplor objektivitas dan kesesuaian desain penelitian yaitu peran dan sinergi stakeholder pemerintah daerah dalam menanggulangi bencana alam di Kabupaten Pacitan yang nantinya akan tercipta sebuah laporan hasil penelitian yang tepat dan obyektif.

“Triangulation is qualitative cross-validation. It assesses the sufficiency of the data according to the convergence of multiple data sources or multiple data collection procedures” (William Wiersma, 1986). Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu (Sugiyono 2010: 273).

Patton (1987: 331) dalam Moelong (2005: 33) triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal itu dapat dicapai dengan jalan:

- 1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
- 2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
- 3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
- 4) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang yang memiliki latar belakang yang berlainan.
- 5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi sesuatu dokumen yang berkaitan.

Triangulasi data digunakan oleh saya karena berkaitan dengan teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan

dokumentasi. Dengan triangulasi sumber data-data yang diperoleh benar-benar dapat teruji keabsahannya.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Lokasi Penelitian

Deskripsi lokasi penelitian merupakan hal yang penting untuk dituangkan dalam sebuah laporan penelitian. Pembahasan mengenai deskripsi lokasi penelitian bertujuan untuk memahami kondisi wilayah yang ditempati oleh suatu masyarakat, sehingga dapat diketahui pola geografis dan sosial suatu masyarakat. Gambaran umum Kabupaten Pacitan akan dijelaskan dalam hasil penelitian.

4.1.1. Letak Dan Keadaan Geografis

Kabupaten Pacitan terletak di sebelah Barat Daya Propinsi Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Sebelah Utara Kabupaten Pacitan berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo (Jawa Timur) dan Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah), sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Trenggalek (Jawa Timur), sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri. Posisi koordinat Kabupaten Pacitan terletak antara $7,55^{\circ}$ - $8,17^{\circ}$ Lintang Selatan dan $110,55^{\circ}$ - $111,25^{\circ}$ Bujur Timur

Tabel 1. Informasi bencana Kabupaten Pacitan

KEJADIAN	JUMLAH KEJADIAN	MENINGGAL	LUKA-LUKA	HILANG	MENDERITA	MENGUNGSI	RUMAH RUSAK BERAT	RUMAH RUSAK RINGAN
BANJIR	27	1	0	0	0	0	3	11
BANJIR DAN TANAH LONGSOR	4	5	0	0	0	0	403	456
GELOMBANG PASANG / ABRASI	2	3	0	1	0	0	0	0
KEKERINGAN	9	0	0	0	0	0	0	0
PUTING BELIUNG	31	0	16	0	226	0	17	37
TANAH LONGSOR	147	1	4	0	0	0	0	0
TOTAL	220	10	20	1	226	0	423	504

Sumber : Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI)

Berdasarkan Tabel 1 diatas, maka dapat dijabarkan bahwa kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten Pacitan adalah :

1. **Tanah longsor** merupakan bencana yang dominan terjadi di Kabupaten Pacitan. Dari 147 kali kejadian mengakibatkan 10 jiwa meninggal, 1 jiwa menderita. Persentase kejadian bencana tanah longsor adalah 67% dari seluruh ancaman yang ada di Kabupaten Pacitan.
2. **Puting beliung** yang merupakan bencana cuaca ekstrim pernah terjadi sebanyak 31 kali atau sekitar 14% dengan mengakibatkan korban luka-luka sebanyak 16 jiwa dan korban menderita sebanyak 226 jiwa. bahkan pada bencana ini juga mengakibatkan 17 rumah mengalami rusak berat serta 37 rumah mengalami rusak ringan.
3. **Banjir** juga pernah terjadi sebanyak 27 kali dengan menyebabkan 1 jiwa meninggal dunia. Bencana ini juga mengakibatkan 3 rumah mengalami rusak berat serta 11 rumah mengalami kerusakan yang ringan. Bencana banjir sekaligus dengan tanah longsor pernah terjadi sebanyak 4 kali dengan jumlah

korban meninggal sebanyak 5 jiwa. Pada bencana ini mengakibatkan 403 rumah dengan kondisi rusak berat dan 456 rumah mengalami kerusakan ringan.

4. **Kekeringan** juga pernah terjadi sebanyak 9 kali tanpa mengakibatkan korban jiwa maupun kerusakan bangunan.
5. **Gelombang Pasang/Abrasi** terjadi sebanyak 2 kali kejadian dengan menyebabkan 3 jiwa meninggal dunia dan 1 jiwa dinyatakan hilang.

Berdasarkan keterangan di atas, Persentase Kejadian Bencana Kabupaten Pacitan dapat dilihat pada Gambar 3.



Dari Gambar 3 dapat diketahui bahwa bencana yang paling sering terjadi di Kabupaten Pacitan adalah bencana tanah longsor dengan persentase kejadian sebesar 67%. Bencana puting beliung dan bencana banjir terjadi dengan persentase masing-masing 14% dan 12%. Untuk bencana lainnya yang pernah

terjadi di Kabupaten Pacitan yaitu bencana kekeringan dengan persentase 4%, sedangkan gelombang pasang/abrasi hanya terjadi tidak lebih dari 1%. Untuk banjir yang disertai tanah longsor terjadi dengan persentase 1,82%.

4.1.3. Pendidikan

Salah satu faktor utama keberhasilan pembangunan disuatu daerah adalah tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, maka melalui jalur pendidikan pemerintah secara konsisten berupaya meningkatkan SDM penduduk melalui berbagai program. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat keberhasilan bidang pendidikan adalah tingkat buta huruf artinya dengan rendahnya tingkat buta huruf menunjukkan keberhasilan program pengentasan buta huruf dan untuk mencapai program tersebut harus didukung oleh sarana pendidikan yang memadai. Di Kabupaten Pacitan sarana pendidikan yang tersedia meliputi sekolah PAUD/TK, SD, SLTP, SMA/SMK dan Perguruan Tinggi.

4.1.4. Kesehatan Dan Keluarga Berencana

Pembangunan bidang kesehatan meliputi seluruh siklus atau tahapan kehidupan manusia. Bila pembangunan kesehatan berhasil dengan baik maka secara langsung atau tidak langsung akan terjadi peningkatan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan merupakan bagian yang sangat penting dalam rangka peningkatan SDM penduduk Kabupaten Pacitan, karena itu program-program kesehatan telah dimulai atau diprioritaskan pada calon generasi penerus. Dengan adanya upaya tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang baik, yang akhirnya akan meningkatkan produktivitas. Dan untuk meningkatkan derajat

kesehatan masyarakat antara lain dilakukan dengan penambahan tenaga para medis.

4.1.5. Pemerintahan

Secara Administratif pada akhir tahun 2016 Kabupaten Majalengka terdiri dari 12 Kecamatan dan 155 Desa dan 5 kelurahan.

4.2. Pembukaan Akses Terhadap Informan

Perjalanan penelitian mengenai peran pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana alam di Kabupaten Pacitan bermula ketika saya tertarik dengan beberapa fenomena dan kejadian bencana alam di Indonesia, baik dari sumber media cetak, internet, ataupun televisi. Sehingga terlintas dalam benak pikiran saya bahwa permasalahan mengenai kebencanaan sepertinya cukup menarik untuk dikaji. Pada waktu itu, saya mencoba untuk mendiskusikan dengan teman dan dosen untuk melihat sejauh mana spesifikasi penelitian yang akan saya lakukan. Ternyata, melalui beberapa tahap diskusi dan dialog dengan beberapa dosen, kajian yang akan saya lakukan disarankan lebih spesifikasi pada lingkup birokrasi dan politik dalam penanggulangan bencana. Pemilihan lokasi penelitian, saya memfokuskan di Kabupaten Pacitan. Pacitan dipilih sebagai lokasi penelitian karena secara geografis Kabupaten Pacitan merupakan daerah rawan bencana alam yang kemudian ada sebuah organisasi perangkat daerah yang konsen dalam penanggulangan bencana dan baru didirikan pada tahun 2011 yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pacitan. Selain itu,

Kabupaten Pacitan merupakan tempat bekerja, sehingga saya lebih mudah dalam mengakses sumber informasi dan data dalam menjalankan penelitian.

Belum lama ini tepatnya di bulan Nopember 2017 terjadi cuaca ekstrem akibat pengaruh Siklon Tropis Cempaka yang menyebabkan bencana banjir, longsor dan puting beliung. BMKG telah menyampaikan peringatan dini adanya siklon tropis Cempaka yang berada di perairan sekitar 32 km sebelah selatan-tenggara Pacitan Provinsi Jawa Timur. Kekuatan siklon 65 km per jam pada Selasa (28/11/2017). Dampak dari siklon tropis Cempaka adalah cuaca ekstrem seperti hujan deras, angin kencang, dan gelombang tinggi di Jawa dan Bali, Siklon Tropis Cempaka yang menyebabkan bencana terjadi di Jawa Timur. Hingga saat ini tercatat di Pusdalops BPBD Jatim, bencana akibat TC Cempaka adalah Pacitan, Sidoarjo, dan Ponorogo.

4.3. Hasil Penelitian

4.3.1. Kualitas Hasil Kerja

Adapun Kualitas Hasil kerja di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat yang menjadi korban bencana dari ancaman bencana. Hal ini juga terdapat dalam Undang-undang No.24 Tahun 2007 Pasal 4 yang menyatakan bahwa Penanggulangan bencana bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana.

Maka berdasarkan hasil wawancara dan observasi oleh saya, maka dapat dijabarkan sebagai berikut :

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan berharap terbentuknya BPBD Kabupaten Pacitan ini dapat menangani masalah bencana banjir dan longsor dengan Optimal. Dan memberikan perlindungan untuk korban bencana banjir dan longsor. Serta masyarakat yang dapat bekerjasama dengan BPBD Kabupaten Pacitan agar permasalahan yang terjadi dalam penanggulangan bencana dapat diselesaikan dengan mudah dan cepat.

Terkait dengan kualitas hasil kerja BPBD Kabupaten Pacitan ini, berikut tanggapan dari Kepala Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan bahwa :

“Selama ini BPBD Kabupaten Pacitan sudah memberikan pelayanan dan juga memberikan kinerja yang cukup baik. Sebagai contoh, dalam hal tanggap darurat BPBD Kabupaten Pacitan berusaha untuk hadir tepat waktu untuk mengevakuasi warga yang terdampak banjir. Dalam membantu masyarakat yang menjadi korban banjir dan longsor BPBD Kabupaten Pacitan dibantu oleh pihak lainnya, seperti TNI/POLRI, LSM, Tagana, Relawan, dan pihak swasta lainnya. Dari sejumlah Rencana Kerja dan Program yang telah disusun oleh pihak BPBD Kabupaten Pacitan masih ada program yang belum terealisasi ataupun terlaksana, yaitu program Rehabilitasi dan Rekonstruksi. BPBD Kabupaten Pacitan juga masih perlu dilakukan pembenahan baik dari segi struktur organisasi dan juga perekrutan staff/pegawai BPBD Kabupaten Pacitan. Peralatan ataupun sarana dan prasarana yang lebih lengkap sangat dibutuhkan. Pada awal terjadinya tanggap darurat banjir dan longsor BPBD Kabupaten Pacitan belum mempunyai sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja menanggulangi beban para pengungsi. Adapun yang menjadi penghambat BPBD Kabupaten Pacitan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah keterbatasan biaya yang diberikan kepada BPBD Kabupaten Pacitan sebagai anggaran untuk pelaksanaan tugas dan keterbatasan personil. Walaupun seperti itu kinerja

BPBD Kabupaten Pacitan juga sudah menunjukkan hasil kerja yang cukup baik dengan terlaksananya perelokasian warga yang menjadi korban banjir dan longsor.

Sama halnya dengan Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan menanggapi kualitas hasil kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan :

“Kinerja yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Pacitan masih harus diperbaiki mengingat BPBD Kabupaten Pacitan terbilang baru terbentuk delapan tahun yang lalu. Sarana dan prasaran BPBD Kabupaten Pacitan belum memadai untuk mendukung BPBD Kabupaten Pacitan dalam menjalankan tugasnya. Tetapi walaupun seperti itu kinerja BPBD Kabupaten Pacitan sudah cukup baik untuk ukuran BPBD Kabupaten Pacitan yang terbentuk kurang lebih delapan tahun ini dari segi pencegahan bencana dan Kesiapsiagaan yang telah menginformasikan peringatan bencana kepada masyarakat yang disekitar wilayah Kabupaten Pacitan.”.

Berdasarkan hasil wawancara dapat saya simpulkan bahwa kualitas kinerja BPBD Kabupaten Pacitan sudah cukup baik dalam menangani bencana banjir dan tanah longsor. Meskipun masih ada masalah-masalah yang ada di BPBD Kabupaten Pacitan tetapi BPBD Kabupaten Pacitan sudah berusaha untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Dan tanggapan masyarakat yang menjadi korban banjir dan tanah longsor tentang kualitas hasil kerja BPBD Kabupaten Pacitan ini adalah :

“Bencana Banjir ini telah merendam rumah saya yang selama ini saya tempati. Tetapi saya bersyukur juga telah terbentuknya BPBD di Kabupaten Pacitan ini. Karena BPBD Kabupaten Pacitan sangat membantu dalam menangani masalah bencana ini. Mereka cepat dalam mengevakuasi masyarakat yang menjadi korban bencana banjir. Tetapi dalam pemberian bantuan untuk pengungsi berjalan dengan lambat dan tertunda. Meskipun begitu BPBD Kabupaten Pacitan dapat memberikan perlindungan kepada

masyarakat yang menjadi korban banjir. Kinerja BPBD Kabupaten Pacitan yang bekerja sama dengan TNI/POLRI yang sangat membantu masyarakat adalah sudah ada tempat mengungsi untuk warga yang menjadi korban banjir. Kami sudah sangat bersyukur banyak pihak yang sudah membantu kami terutama BPBD Kabupaten Pacitan.”

Berdasarkan wawancara tersebut saya menyimpulkan bahwa kinerja BPBD Kabupaten Pacitan sudah baik dalam menjalankan tugasnya dan sangat membantu masyarakat yang menjadi korban banjir dan tanah longsor.

4.3.2. Ketepatan Waktu Menyelesaikan Pekerjaan

Cepat dan tepatnya suatu pekerjaan juga didukung dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai. Selain itu, agar cepat terselesaikannya suatu pekerjaan juga dengan disiplinnya pegawai. Pendidikan dan pelatihan para pegawai juga sangat mendukung dalam cepat selesainya suatu pekerjaan.

Terkait dengan ketepatan waktu menyelesaikan pekerjaan BPBD Kabupaten Pacitan ini, berikut tanggapan dari Kepala Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan bahwa :

“BPBD Kabupaten Pacitan dalam segi ketepatan waktu cukup baik, sebagian pegawai yang sudah disiplin dalam ketepatan waktu masuk jam kerja. Walaupun untuk mendukung kinerja pegawai sarana dan prasarana yang ada di BPBD Kabupaten Pacitan sangat kurang memadai. Anggaran BPBD Kabupaten Pacitan yang diberikan Pemerintah masih kurang untuk menangani para pengungsi, sehingga bantuan yang diberikan kepada pengungsi berjalan dengan lambat. Tetapi, BPBD Kabupaten Pacitan tetap berusaha maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Meskipun masih ada hambatan, BPBD Kabupaten Pacitan sudah memiliki peta rawan bencana,

sehingga dapat membantu menyelesaikan pekerjaan dan membantu masyarakat untuk waspada dengan kawasan-kawasan mana saja yang termasuk dalam kawasan rawan bencana”

Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan menanggapi ketepatan waktu BPBD Kabupaten Pacitan dalam menyelesaikan pekerjaan, bahwa :

“BPBD Kabupaten Pacitan kurang tepat dalam menyelesaikan pekerjaan karena adanya beberapa hambatan yang membuat pekerjaan BPBD Kabupaten Pacitan berjalan lama. Hambatan itu yaitu, kurangnya jumlah SDM, kurangnya anggaran yang diberikan kepada BPBD Kabupaten Pacitan, sarana dan prasarana yang masih sangat kurang memadai, dan kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah (Dinas-dinas Sosial di Kabupaten Pacitan). Sehingga memperlambat selesainya pekerjaan yang dilakukan BPBD Kabupaten Pacitan. Walaupun begitu sebagian pegawai BPBD Kabupaten Pacitan sudah disiplin dalam segi masuk jam kerja dan jam pulang kerja.”

Berdasarkan wawancara tersebut menyimpulkan bahwa adanya hambatan yang ada di BPBD Kabupaten Pacitan, seperti kurangnya sarana dan prasarana dan kurangnya anggaran untuk mendukung cepat selesainya suatu pekerjaan menyebabkan kurang tepat waktunya BPBD Kabupaten Pacitan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Tanggapan dari masyarakat tentang ketepatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaannya, yaitu :

“BPBD Kabupaten Pacitan kurang cepat dalam menangani bencana ini, seperti kurang tersedianya perahu untuk mengevakuasi warga yang menjadi

korban banjir.” Bantuan yang diterima korban bencana banjir juga berjalan lambat.”

Kesimpulan yang saya ambil dari wawancara tersebut adalah kurangnya kendaraan operasional yang membuat pekerjaan BPBD Kabupaten Pacitan menjadi lama dalam mengevakuasi warga yang menjadi korban banjir dan tanah longsor. Dan penanganan masalah bantuan untuk pengungsi masih berjalan lambat.

4.3.3. Inisiatif

Usaha yang dilakukan BPBD Kabupaten Pacitan untuk mencapai kinerja yang diinginkan dengan sering mensosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat mudah terlibat dalam penanganan bencana, seperti pembentukan posko bencana, informasi kerusakan, dan evakuasi.

Adapun Tanggapan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pacitan mengatakan, bahwa :

“Untuk usaha BPBD Kabupaten Pacitan dalam menanggulangi bencana banjir dan tanah longsor sudah cukup bagus. Sering mensosialisasikan atau berdiskusi bersama warga untuk penanganan bencana. sehingga masyarakat apabila terjadi bencana sudah dapat melakukan apa yang harus mereka lakukan, dengan sudah mengetahui titik posko pengungsian yang sudah di informasikan dari pihak BPBD Kabupaten Pacitan. Sehingga mereka dapat ikut membantu kerja BPBD Kabupaten Pacitan dengan cepat.”

Serupa dengan apa yang dikemukakan oleh Kasi. Pencegahan dan Kesiapsiagaan mengatakan bahwa :

“Inisiatif ataupun usaha yang telah di lakukan BPBD Kabupaten Pacitan dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana banjir dan tanah longsor sudah bagus. Karena pihak BPBD Kabupaten bekerjasama juga dengan masyarakat yang menjadi korban banjir dan tanah longsor dalam hal tanggap darurat. BPBD Kabupaten Pacitan yang mensosialisasikan kepada masyarakat bagaimana hal yang harus dilakukan dalam menghadapi bencana. Tetapi yang menjadi kendala BPBD Kabupaten Pacitan dalam menjalankan tugasnya, kurangnya koordinasi dengan instansi pemerintah lain seperti Dinas-dinas sosial Kabupaten Pacitan yang kurang membantu dalam penanggulangan bencana ini, karena mereka beranggapan masalah bencana hanya tugas dari BPBD Kabupaten Pacitan saja. Sehingga membuat beban BPBD Kabupaten Pacitan menjadi berat karena kurang adanya kerjasama dengan instansi yang lain. BPBD Kabupaten Pacitan selain bekerjasama dengan masyarakat ada juga pihak-pihak yang sudah banyak membantu seperti, TNI/POLRI, LSM, dan Mahasiswa, yang sudah banyak memberi bantuan berupa, tenda untuk posko pengungsi, sembako, obat-obatan yang dapat membantu di posko pengungsian. BPBD Kabupaten Pacitan juga tetap siaga dalam menjalankan tugasnya walaupun cuaca buruk.”

Berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan, maka saya menarik kesimpulan bahwa inisiatif atau usaha BPBD Kabupaten Pacitan sudah cukup maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Adanya usaha dari BPBD

Kabupaten Pacitan yaitu tetap siaga apabila terjadi bencana dengan cuaca yang kurang baik tetapi BPBD Kabupaten Pacitan tetap menjalankan tugasnya. Dan adanya inisiatif BPBD Kabupaten Pacitan yang mensosialisasikan kepada masyarakat tentang tanggap darurat memudahkan masyarakat dalam menangani bencana yang terjadi. Mereka jadi sudah dapat mengantisipasi dan sudah mengetahui tempat-tempat yang aman apabila bencana terjadi. Dan tanggapan masyarakat tentang usaha dari pihak BPBD Kabupaten Pacitan dalam menjalankan tugasnya mengatakan bahwa :

“BPBD Kabupaten Pacitan sudah cukup baik dalam usaha menanggulangi bencana. BPBD juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar mengetahui tindakan apa yang dilakukan apabila terjadi bencana. Sehingga kami lebih dapat mengetahui tindakan apa yang harus kami lakukan apabila terjadinya bencana banjir. Walaupun terkadang pihak BPBD Kabupaten Pacitan telat dalam mengatasi bencana tetapi karena mereka sudah menginformasikan terlebih dahulu kepada masyarakat untuk menangani bencana ini sehingga kami sudah lebih dahulu telah mengamankan ke tempat titik-titik posko yang telah di beri tahu oleh pihak BPBD Kabupaten Pacitan.”

4.3.4. Kemampuan Menyelesaikan Pekerjaan

Kinerja BPBD Kabupaten Pacitan sangat perlu didukung dengan adanya sarana dan prasarana yang lengkap. Sehingga BPBD Kabupaten Pacitan dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Dan apabila sarana dan prasarana yang memadai pihak BPBD Kabupaten Pacitan akan lebih cepat dalam menjalankan tugasnya. Selain sarana dan prasarana, koordinasi dengan pihak-

pihak lain juga sangat membantu BPBD Kabupaten Pacitan dalam menangani masalah bencana. Adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan keahliannya juga sangat membantu cepat terselesainya suatu pekerjaan dengan maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan bahwa :

“ Kendala yang ada pada BPBD Kabupaten Pacitan dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah kurangnya koordinasi antar instansi, kurangnya jumlah SDM, sarana dan prasarana yang kurang memadai. Adanya kendala itu memperlambat kerja dari BPBD Kabupaten itu sendiri. Pegawai BPBD Kabupaten Pacitan sudah cukup disiplin dalam masuk kerja dan pulang kerja. Masalah pelatihan untuk para pegawai di BPBD Kabupaten Pacitan sudah pernah melakukan pelatihan memberikan penjelasan tentang bagaimana cara-cara menanggulangi bencana dan tanggap darurat bencana. Untuk SOP (Standar Operasional Prosedur) di BPBD Kabupaten Pacitan ini belum terlaksana. Anggaran yang masih terbatas yang diberikan kepada BPBD Kabupaten Pacitan juga menjadi persoalan mendasar untuk dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Selain itu yang juga menjadi persoalan adalah sumber daya manusia dari aspek kualitas maupun kuantitas masih perlu pembenahan untuk mendapatkan hasil kinerja yang optimal dalam memberikan pelayanan.”

Hal tersebut juga dipertegas oleh Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan bahwa :

“ Kurang tersedianya sarana dan prasarana di BPBD Kabupaten Pacitan menjadi suatu kendala yang membuat BPBD Kabupaten Pacitan lama menyelesaikan pekerjaannya. Jumlah Sumber Daya Manusia yang berkualitas di BPBD Kabupaten Pacitan kurang memadai sehingga memperlambat selesainya pekerjaan yang mereka kejakan dalam menangani masalah bencana. Meskipun seperti itu BPBD Kabupaten Pacitan sudah cukup maksimal menyelesaikan tugasnya dengan keterbatasan masalah-masalah tersebut.”

Kesimpulan yang saya ambil dari wawancara tersebut adalah pegawai BPBD Kabupaten Pacitan telah menjalankan tugas dengan cukup baik dan cepat tanggap dalam menangani masalah bencana banjir dan tanah longsor. Tetapi karena kurangnya jumlah SDM, kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah dan kurangnya sarana dan prasarana yang diberikan kepada BPBD Kabupaten Pacitan membuat kinerja BPBD Kabupaten Pacitan tidak dapat berjalan maksimal.

Mengenai hal kemampuan menyelesaikan pekerjaan, tanggapan dari masyarakat yang menjadi korban banjir dan tanah longsor mengatakan bahwa :

“BPBD Kabupaten Pacitan dalam menangani bencana banjir ini kurang cepat karena terbatasnya perahu yang membawa masyarakat ketempat yang lebih aman. Kalau untuk soal pemberian bantuan BPBD Kabupaten Pacitan sudah cukup cepat. Sehingga dapat membantu masyarakat yang ada dipengungsian seperti, diberikannya bantuan sembako, tenda dan obat-obatan. Adapun pihak yang lain yang memberikan bantuan seperti masyarakat pacitan yang merantau ke luar pacitan,, ada juga bantuan dari

masyarakat luar kabupaten pacitan, dan lainnya. Pihak-pihak tersebut sangat membantu BPBD Kabupaten Pacitan dalam menangani masalah bencana banjir ini.”

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan, dapat diketahui bahwa banyak kendala yang dihadapi oleh BPBD Kabupaten Pacitan yang membuat pekerjaan yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Pacitan menjadi lama terselesaikan.

4.3.5. Kemampuan membina kerjasama dengan pihak lain

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat perlu mendapatkan dukungan dari pihak-pihak lain. Agar suatu pekerjaan dapat dijalani dengan maksimal. Dengan mampu menjalin kerjasama dengan pihak lain dapat membantu BPBD Kabupaten Pacitan dalam mengatasi penanggulangan bencana banjir dan tanah longsor. Komunikasi yang baik juga dapat mendukung dalam penanggulangan bencana ini.

Berdasarkan penjelasan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan mengatakan bahwa :

“BPBD Kabupaten Pacitan bekerjasama dengan BPBD Proinsi. Jawa Timur, TNI/POLRI, LSM, Universitas-Universitas, Tagana, Relawan, dan Pihak-pihak Swasta. Dengan adanya kerjasama dengan pihak-pihak lain sangat membantu kerja dari BPBD Kabupaten Pacitan dalam menanggulangi bencana. Akan tetapi, kerjasama dengan antar instansi daerah kurang memberikan respon dan tanggapan karena mereka beranggapan masalah bencana hanya di tangani oleh BPBD Kabupaten Pacitan saja sehingga kurang terjalannya kerjasama dengan instansi-instansi daerah kabupaten Pacitan.”

Hal yang serupa juga dijelaskan oleh Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mengatakan bahwa :

“BPBD Kabupaten Pacitan banyak bekerjasama dengan pihak-pihak lain seperti dengan BPBD Provinsi Jawa Timur yang telah membantu BPBD Kabupaten Pacitan dalam menangani bencana banjir dan tanah longsor ini. Karena sebelum terbentuknya BPBD Kabupaten Pacitan masalah banjir dan tanah longsor juga di tangani oleh BPBD Provinsi Jawa Timur dan juga TNI/POLRI. Pihak-pihak swasta juga banyak memberikan bantuan kepada BPBD Kabupaten Pacitan dalam menangani masalah bencana. “

Kesimpulan dari wawancara tersebut mengenai kemampuan membina kerjasama dengan pihak lain sudah bagus. Banyak pihak-pihak lain yang memiliki kepedulian yang tinggi dalam penanggulangan bencana banjir dan tanah longsor.

Adapun tanggapan masyarakat tentang kemampuan membina kerjasama dengan pihak lain, mengatakan bahwa :

“Kami mendapatkan banyak bantuan dari beberapa pihak seperti, TNI/POLRI, BPBD Kabupaten Pacitan, BNPB Pusat, LSM, dan Pihak Swasta lainnya. Kami sangat terbantu oleh mereka-mereka yang peduli pada masyarakat yang menjadi korban banjir dan tanah longsor.”

4.4. Analisis Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Kabupaten Pacitan dalam Upaya Penanggulangan Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Pacitan

Keberhasilan dalam pelaksanaan tugas Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pacitan untuk mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan sangat dipengaruhi oleh lingkungan strategis sebagai faktor penentu keberhasilan dalam kinerja BPBD Kabupaten Pacitan. Untuk dapat mengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan maka terlebih dahulu perlu

dianalisa sampai seberapa jauh misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan dipengaruhi oleh faktor intern dan ekstern organisasi. Dengan mengetahui pengaruh intern dan ekstern organisasi maka untuk dapat mencapai keberhasilan pelaksanaan tugas perlu didorong dan ditumbuh kembangkan faktor organisasi yang memberi kekuatan dan peluang guna dimanfaatkan untuk pengembangan suatu organisasi. Sebaliknya faktor yang menjadi penghambat organisasi seperti kelemahan dan ancaman dapat diantisipasi dengan diatasi sejak dini agar tidak dapat berpengaruh negative terhadap upaya pencapaian tujuan organisasi. Indikator Kinerja menurut T.R.Mitchell menggunakan analisis SWOT untuk mengetahui bagaimana kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan dalam upaya penanggulangan bencana banjir dan tanah longsor tersebut.

4.5. Analisis Kendala yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan dalam Upaya Penanggulangan Bencana Banjir dan Tanah Longsor

4.5.1. Kurang Adanya Koordinasi

Salah satu misi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan adalah meningkatnya koordinasi dengan instansi terkait dalam penanggulangan bencana. Yang menjadi kendala dalam pengkoordinasian adalah kendala yang disebabkan tanggung jawab satuan kerja kurang jelas, kurang adanya koordinasi yang baik antara unsur-unsur pengarah, seperti BPBD Kabupaten Pacitan, Dinas Sosial Kabupaten Pacitan, TNI/POLRI, Tagana, Relawan, Universitas-universitas, LSM dan lain sebagainya. Kurangnya

koordinasi ini menyebabkan lambatnya pemberian bantuan bencana karena antar instansi kurang dapat bekerja sama dengan efektif.

4.5.2. Kurangnya Sarana dan Prasarana

Sumber daya lainnya yang sangat penting adalah sarana dan prasarana. Dalam Permendagri Nomor 27 tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana dalam Penanggulangan Bencana pasal 3 dinyatakan bahwa sarana dan prasarana meliputi dua yaitu sarana dan prasarana umum dan khusus. Sarana dan prasarana umum meliputi peralatan peringatan dini, posko bencana, kendaraan operasional, pos kesehatan dengan tenaga medis dan obat-obatan, tenda darurat, sarana air bersih dan pendataan bagi korban jiwa akibat bencana banjir dan tanah longsor. Sarana dan prasarana khusus meliputi rumah sakit lapangan, trauma center, dan alat transportasi daerah.

4.5.3. Kurangnya Sumber Daya Manusia

Tersedianya Sumber Daya Manusia merupakan hal yang sangat penting. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pacitan sudah berdiri tahun 2011 dimana BPBD Kabupaten Pacitan masih kurang mapan. Hal ini dapat dilihat belum memiliki gudang logistik dan berada dalam zona merah. Hal ini tentu saja menyulitkan dalam koordinasi pelaksanaan tugasnya. Selain itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Pacitan juga masih kekurangan SDM yang memiliki kesesuaian keahlian dan pendidikan. Sumber Daya Manusia yang memiliki keahlian dibidang kesehatan untuk ditempatkan dibidang kedaruratan dan logistik, keahlian dibidang teknik sipil untuk ditempatkan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi serta tata ruang dan sosial untuk ditempatkan

dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan dimana pegawai benar-benar mengerti dan memahami seluk beluk penanganan bencana. Kekurangan Sumber Daya Manusia juga menyebabkan pekerjaan membutuhkan waktu yang lama karena ketidakseimbangan antara yang dilayani dengan yang melayani. Dari hasil wawancara ini, saya menyimpulkan bahwa pelatihan dan pembobotan perlu dilakukan terhadap semua aparatur BPBD sehingga mereka memahami tupoksi masing-masing dan tidak menghambat pelaksanaan tugas yang diemban.

4.5.4. Belum terlaksananya SOP (Standar Operasional Prosedur)

Dari data yang saya temukan dilapangan tentang kinerja BPBD Kabupaten Pacitan dalam upaya penanggulangan bencana banjir dan tanah longsor, yang menjadi salah satu penghambat adalah, bahwa BPBD Kabupaten Pacitan belum terlaksananya Standard Operation Procedure (SOP) Penanggulangan Bencana yang dapat menjadi rujukan dalam menanggulangi bencana yang terjadi di Kabupaten Pacitan termasuk mengenai kinerja BPBD Kabupaten Pacitan dalam upaya penanggulangan bencana banjir dan tanah longsor.

4.6. Analisis strategi yang dilakukan dalam menghadapi kendala yang ada pada BPBD Kabupaten Pacitan dalam Upaya Penanggulangan Bencana Banjir dan Tanah Longsor menggunakan matriks SWOT

4.6.1. Kualitas Hasil Kerja

Dari analisis internal dan eksternal SWOT tentang Kinerja BPBD Kabupaten Pacitan memperoleh strategi dalam menghadapi kendala yang ada di BPBD Kabupaten Pacitan, yaitu :

STRATEGI SO

1. Meningkatkan kualitas dan pelayanan aparatur agar dapat menangani masalah bencana banjir dan tanah longsor secara maksimal.
2. Meningkatkan kerja sama tim dengan pihak –pihak lain agar masalah yang dihadapi dalam penanggulangan bencana berjalan dengan mudah

STRATEGI ST

1. Memanfaatkan anggaran yang diberikan Pemerintah Pusat dengan menggunakan sebaik-baiknya.
2. Meningkatkan kerjasama dengan antar daerah agar penanggulangan dapat diatasi dengan cepat.

STRATEGI WO

1. Menambah jumlah pegawai agar penanganan bencana dapat diselesaikan dengan cepat.
2. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana
3. Meningkatkan komunikasi yang baik dengan Pemerintah Pusat agar dapat selalu mendukung BPBD Kabupaten Pacitan dalam mengatasi bencana banjir dan tanah longsor.

STRATEGI WT

1. Mendorong berkembangannya tanggung jawab aparatur BPBD
2. Meningkatkan jumlah Tim Reaksi Cepat agar lebih dapat membantu dalam penanganan bencana di lapangan.
3. Meningkatkan motivasi terhadap pegawai agar pegawai semangat dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

4.6.2. Ketepatan waktu menyelesaikan pekerjaan

STRATEGI SO

1. Memanfaatkan kerjasama dengan Pemerintah Pusat agar mempermudah dalam menangani bencana.
2. Meningkatkan jumlah Sumber Daya Manusi (SDM) untuk mempercepat selesainya suatu pekerjaan.

STRATEGI ST

1. Meningkatkan kualitas pegawai agar dapat memanfaatkan biaya yang sudah diberikan kepada BPBD Kabupaten Pacitan
2. Meningkatkan sarana dan prasarana komunikasi masyarakat untuk bisa mendeteksinya terjadinya bencana.

SRATEGI WO

1. Memberikan pelatihan dan pendidikan tenaga kerja agar didaptnya kualitas pekerja yang baik
2. Lebih dimanfaatkannya anggaran yang telah diberikan agar dapat meminimalkan biaya dalam menangani bencana banjir dan tanah longsor

STRATEGI WT

1. Ditingkatkannya kualitas SDM agar dapat meminimalkannya anggaran yang telah diberikan Pemerintah Pusat
2. Meningkatkan pelatihan pegawai agar siap menghadapi cuaca-cuaca yang ekstrim.

4.6.3. Inisiatif

STRATEGISO

1. Mendorong masyarakat untuk mengetahui, memahami, dan bertindak cepat dalam kondisi siaga bencana dan tanggap darurat.
2. Meningkatkan kerjasama antara masyarakat dengan pihak-pihak yang membantu dalam menanggulangi bencana banjir dan tanah longsor.

STRATEGIST

1. Meningkatkan kepedulian sosial antar instansi pemerintah terhadap bencana banjir dan tanah longsor yang menimpa masyarakat yang menjadi korban banjir dan tanah longsor.
2. Meningkatkan keamanan atau pengawasan terhadap gudang tempat penyimpanan bantuan-bantuan.

STRATEGIWO

1. Meningkatkan pengawasan terhadap posko bencana
2. Membangun koordinasi yang efektif dan semangat kebersamaan untuk membuat kesepakatan terbaik bagi kepentingan penanggulangan bencana di Kabupaten Pacitan.

STRATEGIWT

1. Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) agar cepat terselesaikan pekerjaan yang dilakukan.
2. Mempererat kepedulian sosial agar meminimalkan terjadinya penyelewengan dana bantuan.

4.6.4. Kemampuan menyelesaikan pekerjaan

STRATEGISO

1. Meningkatkan kerjasama antara BPBD Kabupaten Pacitan dengan BNPB Pusat agar terorganisir dalam penanggulangan bencana banjir dan tanah longsor
2. Menambah anggota dan meningkatkan kualitas para tim reaksi cepat agar cepat tanggap dalam menanggulangi bencana banjir dan tanah longsor

STRATEGIST

1. Meningkatkan dana anggaran Pusat untuk melengkapi alat-alat penanggulangan bencana banjir dan tanah longsor.
2. Meningkatkan keamanan dan transparansi dana bantuan untuk korban banjir dan tanah longsor.

STRATEGIWO

1. Menambahkan jumlah anggota BPBD Kabupaten Pacitan yang berkualitas agar cepat terselesaikannya masalah penanggulangan bencana.
2. Meningkatkan dana BPBD Kabupaten Pacitan untuk melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penanggulangan bencana banjir dan tanah longsor.

STRATEGIWT

1. SOP di BPBD Kabupaten Pacitan dapat dilaksanakan agar membuat komando tanggap darurat untuk lebih dapat mengatasi masalah penanggulangan bencana banjir dan tanah longsor dengan mudah.

2. Meningkatkan jumlah tenaga kerja di BPBD Kabupaten Pacitan untuk dapat lebih mudah dalam menangani masalah bencana.

4.6.5. Kemampuan membina kerjasama dengan pihak lain

STRATEGISO

1. Meningkatkan komunikasi yang baik dengan masyarakat yang ingin membantu dalam penanganan masalah bencana banjir dan tanah longsor
2. Meningkatkan hubungan kerjasama dengan pihak-pihak swasta yang membantu penanggulangan bencana banjir dan tanah longsor.

STRATEGIST

1. Membuat mekanisme kerjasama antar daerah dengan jelas
2. Meningkatkan sosialisasi dengan masyarakat mengenai penanggulangan bencana.

STRATEGIWO

1. Meningkatkan hubungan kerjasama antar instansi daerah agar penanganan masalah bencana banjir dan tanah longsor berjalan efektif.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana yang ada di BPBD Kabupaten Pacitan agar terjalinnya komunikasi yang baik dengan pihak-pihak yang bekerjasama dengan BPBD Kabupaten Pacitan dalam penanggulangan bencana banjir dan tanah longsor.

STRATEGI WT

1. Meningkatkan dan mempererat hubungan kerjasama dengan pihak-pihak lain yang membantu kinerja BPBD Kabupaten Pacitan dalam menjalankan tugasnya.
2. Membuat mekanisme kerjasama yang jelas.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan dalam Upaya Penanggulangan Bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Pacitan dapat dilihat sebagai berikut :

Upaya peningkatan kinerja BPBD Kab. Pacitan dapat menerapkan SO (*strengths-opportunity*), Meningkatkan kualitas dan pelayanan aparatur agar dapat menangani masalah bencana banjir dan tanah longsor secara maksimal, Meningkatkan kerja sama tim dengan pihak –pihak lain agar masalah yang dihadapi dalam penanggulangan bencana berjalan dengan mudah. Dan menerapkan ST (*strengths-Treats*), Memanfaatkan anggaran yang diberikan Pemerintah Pusat dengan menggunakan sebaik-baiknya, Meningkatkan kerjasama dengan antar daerah agar penanggulangan dapat diatasi dengan cepat. Menerapkan WO (*weakness-opportunity*), Menambah jumlah pegawai agar penanganan bencana dapat diselesaikan dengan cepat, Meningkatkan koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana, Meningkatkan komunikasi yang baik dengan Pemerintah Pusat agar dapat selalu mendukung BPBD Kabupaten Pacitan dalam mengatasi bencana banjir dan tanah longsor. Dan juga menerapkan WT (*weakness- treats*), Mendorong berkembangannya tanggung jawab aparatur BPBD,

Meningkatkan jumlah Tim Reaksi Cepat agar lebih dapat membantu dalam penanggulangan bencana di lapangan, Meningkatkan motivasi terhadap pegawai agar pegawai semangat dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

5.2. Saran

Saran yang diberikan setelah melakukan penelitian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan adalah :

Untuk strategi yang dilakukan diharapkan dapat membantu BPBD Kabupaten Pacitan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

Menanggapi berbagai permasalahan dalam penanggulangan bencana alam di Kabupaten Pacitan, maka pemerintah daerah yang mempunyai peran vital dalam hal tersebut bersama stakeholder lain, dan masyarakat perlu duduk bersama dan merumuskan langkah-langkah konkrit. Partisipasi aktif masyarakat sebagai elemen kunci juga perlu ditingkatkan. Hal ini merupakan sebuah proses yang kontinu dan perlu adanya komitmen kuat dari penentu kebijakan serta mempertimbangkan metode pendekatan-pendekatan khusus terkait budaya dan kultur masyarakat yang rentan bencana tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Alma, Buchari. 2008. *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*. Bandung: CV. Alfabeta
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 2014, *Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2013*
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan. 2013, *Dokumen Kajian Risiko bencana Kabupaten Pacitan*.
- Certo, Samuel C. & J. Paul Peter. 1990. *STRATEGIC MANAJEMEN : Focus on Procces*. New York, McGrow-Hill, Inc.
- Gibson, dkk. Terj. Djarkasih. 1994. *Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Halim, Rahmawati, 2014. *Analisis Strategi Peningkatan Kinerja Bagian Sekretariat Pada Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Banggai*. JURNAL ACADEMICA Fisip Untad VOL.06 No.
- Musyadad, Anwar, 2015. *Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Lebak*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unisversitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Hunger, J. David & Thomas L. Wheelen. 1998. *Strategic Manajemen : Bisnis Policy, Entering 21'st Century Global Society*. USA. Adison Wesley-Longman, Inc.
- Muhammad, Suwarsono. 2000. *Manajemen Strategik : Konsep dan Kasus*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta.
- Sugiyono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta.
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung, Alfabeta.
- Suri, Nur Khotimah, 2015. *Analisis Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karo Dalam Upaya Penanggulangan Bencana Erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo*.
- Winardi. 2005. *Pemikiran Sistemik Dalam Bidang Organisasi dan Manajemen*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Sumber dari internet :

<https://bnpb.go.id/home/sejarah>

<https://www.slideshare.net/luthfimaolani/strategi-organisasi-59719910>

**STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat**